

TESIS

PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS YANG BERSIFAT ALTERNATIF DALAM KUHP NASIONAL (UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2023)

UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Oleh:

PRATAMA ALIFIANDI MARTIO

NPM: 24310008

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2025

T E S I S

**PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS YANG
BERSIFAT ALTERNATIF DALAM KUHP NASIONAL
(UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2023)**



Oleh:

PRATAMA ALIFIANDI MARTIO

NPM: 24310008

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2025**

TESIS
PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS YANG
BERSIFAT ALTERNATIF DALAM KUHP NASIONAL
(UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2023)

Diajukan Oleh :
PRATAMA ALIFIANDI MARTIO
NPM : 24310009

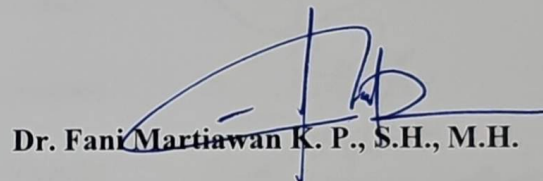
Tesis Ini Telah disetujui untuk diuji
Tanggal 8 Desember 2025

Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Hari Wibisono S.H., M.H.


Dr. Fani Martiawan K. P., S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Pada
Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H.

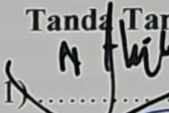


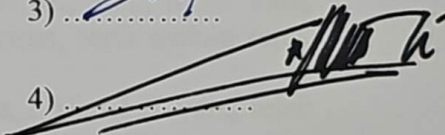
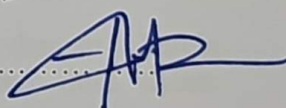
TESIS
PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS YANG
BERSIFAT ALTERNATIF DALAM KUHP NASIONAL
(UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2023)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

PRATAMA ALIFIANDI MARTIO
NPM: 24310008

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 18, Desember 2025

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
1. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.	(Ketua)	1) 
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.	(Anggota)	2) 
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.	(Anggota)	3) 
4. Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H.	(Anggota)	4) 
5. Dr. Fani Martiawan K. P., S.H., M.H.	(Anggota)	5) 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar
Magister

Tanggal : **18 Desember 2025**

Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pidana Mati Sebagai Pidana Khusus Yang Bersifat Alternatif Dalam Kuhp Nasional (Undang – Undang No. 1 Tahun 2023)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Istri Penulis, Nabila Aulia Nurahma, S.H., telah menjadi support system utama penulis, selalu menemani dan membimbing Penulis.
2. Orang Tua Penulis, Penulis yakni Bapak H. Sulistiyo, S.H., M.H., dan Ibu Mariya, serta Mertua Bapak H. Andri Yusufiana Sambas, S.E., M.M., Ibu Melia Wulansari, ST., Ibu Muhana Sulistyaningsih yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi untuk penulis.
3. Ibu Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. Ir. Rr. Nugraini Susantina Wisnujati, M.Si.
4. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv.
5. Bapak Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H.
6. Bapak Dosen Pembimbing I, Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II, Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak Dosen, Ahmad Basuki, S.H., M.H. yang secara sukarela meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam melakukan penulisan Tesis ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum serta semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat memberikan

manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 22 Desember 2025



Pratama Alifiandi Martio
NPM : 24310008

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Pratama Alifiandi Martio
NPM : 24310008
Alamat : Jln. Dukuh Kupang XXIX No. 61
No. Telp (HP) : 081259567790

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “**PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS YANG BERSIFAT ALTERNATIF DALAM KUHP NASIONAL (UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2023)**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarism maupun autoplaiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 22 Desember 2025

Yang menyatakan,



Pratama Alifiandi Martio

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Kajian Teoritis	7
1. Pidana Mati	7
2. Pidana Khusus.....	11
3. Pendekatan Keadilan Substantif.....	16
4. Pemidanaan Modern	20
F. Metode Penelitian.....	25
1. Tipologi Penelitian	25
2. Metode Pendekatan.....	25
3. Bahan Hukum	26
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	26

BAB II KARAKTERISTIK PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA KHUSUS YANG BERSIFAT ALTERNATIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	28
2.1. Pengaturan Pidana Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia..	28
2.2. Pergeseran Paradigma Pidana Mati dari Pidana Pokok ke Pidana Khusus.....	43
2.3. Problematika Penjatuhan Pidana Mati dalam Perspektid Pidana Alternatif	52
BAB III PEMENUHAN PRINSIP KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENGALIHAN PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA DALAM KONTEKS PEMIDANAAN MODERN.....	60
3.1. Prinsip Keadilan Substantif dalam Konteks Pemidanaan Modern	60
3.2. Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Modern.....	78
3.3. Implikasi Disimpanginya Pidana Mati Terhadap Prinsip Keadilan Substantif Dalam Reformasi Hukum Pidana Nasional	87
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	101
4.2. Saran	102
DAFTAR BACAAN	

ABSTRAK

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya terkait pidana mati. Dalam KUHP Nasional, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijatuhkan secara terbatas. Pergeseran ini mencerminkan arah pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji konsep pidana mati sebagai pidana alternatif, mekanisme penerapannya, serta implikasinya terhadap tujuan pemidanaan modern dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hanya dapat dijatuhkan secara selektif terhadap kejahatan luar biasa dengan kemungkinan pengalihan ke pidana penjara melalui masa percobaan. Meskipun mencerminkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis, pengaturan ini masih memerlukan pedoman pemidanaan yang jelas, evaluasi objektif, dan penguatan sistem pemasyarakatan agar selaras dengan arah reformasi hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Pidana Mati; Pidana Alternatif; KUHP Nasional; Pemidanaan Modern; Keadilan Substantif.

ABSTRACT

The enactment of the National Criminal Code through Law Number 1 of 2023 introduces a fundamental change in Indonesia's sentencing system, particularly with regard to the death penalty. Under the National Criminal Code, the death penalty is no longer positioned as a principal punishment but as a special punishment of an alternative nature, imposed in a limited manner. This shift reflects the direction of criminal law reform that emphasizes humanitarian values, substantive justice, and respect for human rights.

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials are qualitatively analyzed to examine the concept of the death penalty as an alternative punishment, its application mechanism, and its implications for the objectives of modern sentencing within the Indonesian criminal justice system.

The findings indicate that under Law Number 1 of 2023, the death penalty may only be imposed selectively for extraordinary crimes, with the possibility of commutation to imprisonment through a probationary period. Although this regulation reflects a more humane sentencing approach, it still requires clear sentencing guidelines, objective evaluation mechanisms, and the strengthening of the correctional system to ensure alignment with the direction of national criminal law reform.

Keywords: Death Penalty; Alternative Punishment; National Criminal Code; Modern Sentencing; Substantive Justice.